

**PENGARUH INVESTASI, TENAGA KERJA, TINGKAT PENDIDIKAN,
DAN KORUPSI TERHADAP PDRB PROVINSI DI INDONESIA**

(TAHUN 2012-2016)

JURNAL



Dosen Pembimbing:

Moh. Bakti Hendrie Anto, SE., M.Sc

Ditulis Oleh :

Nama : Dika Candra Puspitaningrum

Nomor Mahasiswa : 16313040

Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2017

**PENGARUH INVESTASI, TENAGA KERJA, TINGKAT PENDIDIKAN,
DAN KORUPSI TERHADAP PDRB PROVINSI DI INDONESIA**

(TAHUN 2012-2016)

Dika Candra Puspitaningrum

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

(dchandrapuspita95@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi, tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan korupsi terhadap PDRB Provinsi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dari 33 provinsi di Indonesia tahun 2012-2016. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan model *Fixed Effect*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel investasi dan tingkat pendidikan menunjukkan hasil positif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto, variabel tenaga kerja menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional bruto, dan variabel korupsi menunjukkan hasil negatif dan signifikan terhadap produk domestik regional bruto.

Kata Kunci : PDRB, Investasi, Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Korupsi

ABSTRACT

This research aims to analyze the effect on investment, labor, educational level, and corruption against GDP province in Indonesia. This research is empirical research with quantitative approach. The data used in this research in the form of secondary data from 33 provinces in Indonesia year of 2012-2016. Model analysis of the multiple regression analysis is used with the Fixed Effect Model. The results showed that the investment variable and the level of education indicate positive results and significantly to the gross regional domestic product, variable results showed labor has no effect significantly to domestic products gross, and variable corruption showed negative results and significantly to the gross regional domestic product.

Keywords: GDP, Investment, Labor, Educational Level, Corruption

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi suatu negara secara umum berorientasi pada pertumbuhan (*growth*) yaitu apabila tingkat kegiatan ekonomi masa sekarang lebih tinggi daripada yang tercapai pada masa sebelumnya dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Arsyad (2004), pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Salah satu indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi (di daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB) bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu modal, tenaga kerja, dan teknologi (Sukirno, 1994). Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional digunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Sedangkan untuk tingkat daerah digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil.

Negara Indonesia terdiri atas 33 Provinsi yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda antar wilayah. Perbedaan ini berupa perbedaan karakteristik alam, sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda di setiap provinsi. Perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi atau wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam yang dimiliki seharusnya dapat menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Kelebihan yang dimiliki tersebut diharapkan memberikan dampak menyebar (*trickle down effect*). Hanya saja kekayaan alam ini tidak dimiliki oleh seluruh Provinsi di Indonesia secara merata.

Salah satu variabel penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi. (Sukirno, 2012) berpendapat bahwa investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengeluaran penanam-penanam modal

atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa, yang tersedia dalam perekonomian. Di Indonesia bentuk investasi umumnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu investasi yang dilakukan oleh pemerintah/swasta, dan investasi oleh pihak luar negeri. Menurut UU No. 1 tahun 1967 dan UU No. 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang, yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia dalam arti bahwa, pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1968 dan Undang-Undang No. 12 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), disebutkan terlebih dahulu definisi modal dalam negeri pada pasal 1, yaitu: Undang-undang ini dengan “modal dalam negeri” adalah “ bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki negara maupun swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 2 Undang-Undang No.12 tahun 1970 tentang penanaman modal asing.

Disamping investasi, tenaga kerja merupakan suatu faktor yang mempengaruhi output suatu daerah. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar pula. Mereka yang termasuk dalam Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.

Indikator penting lainnya dalam pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu modal dasar manusia yang harus dipenuhi untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor pendidikan memainkan peran utama untuk membentuk kemampuan sebuah negara untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas produksi serta pembangunan yang

berkelanjutan (Todaro, 2006). Dari ketiga indikator di atas, terdapat satu indikator lainnya yaitu korupsi. Menurut World Bank dan IMF, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi menjadi sebuah fenomena global yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Perdebatan tentang hubungan antara korupsi dan pertumbuhan masih berjalan sampai sekarang. Ekonom, sejarawan dan para ahli politik telah terlibat dalam debat yang panjang tentang apakah korupsi membahayakan pertumbuhan ekonomi. Pandangan umum menyatakan bahwa korupsi mengganggu aktivitas ekonomi dengan mendistorsi alokasi sumber daya yang efisien dalam perekonomian.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh investasi, tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan korupsi terhadap pdrb provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2012-2016.

Kajian Pustaka

Beberapa penelitian sebelumnya dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Pemilihan jurnal penelitian sebelumnya didasari oleh kesamaan variabel dependen maupun independen, tujuan penelitian, metode analisis, serta hasil penelitian yang akan digunakan sebagai acuan penelitian sebelumnya.

Dewi (2002) dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan, Investasi Domestik dan Foreign Direct Investment*”. Dalam model pertumbuhan variabel-variabel bebas yang digunakan adalah GDP/kapita, populasi, pendidikan, dan indeks korupsi. Data indeks korupsi yang digunakan adalah indeks korupsi dari *Political Economics Risk Conculancy* pada 11 negara di asia tahun 1995-2000. Metode analisis dengan panel statis. Hasilnya menunjukkan bahwa korupsi berhubungan negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi domestik berhubungan negatif, namun tidak signifikan terhadap FDI. Maksud dari hal ini adalah walaupun hasilnya negatif namun investor

asing lebih mempertimbangkan faktor lain seperti *cost of doing business* di Asia yang lebih kompetitif dibandingkan kawasan lain.

Suryono (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Pengaruh PAD, Tingkat Investasi, dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Jawa Tengah*”. Variabel Independen : Investasi, Tenaga Kerja dan Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi. Model yang digunakan adalah metode runtut waktu (*time series*) dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, Tingkat Investasi, Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial maupun simultan terhadap PDRB Jawa Tengah.

Maulana (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Pengaruh Investasi Tenaga Kerja, dan Tingkat Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat*”. Variabel Independen : Investasi, Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan dan Variabel Dependen : Pertumbuhan Ekonomi dengan metode analisis yang digunakan yaitu metode regresi data panel dengan pendekatan PLS (*Pooled Least Square*). Hasil penelitian yang di dapat dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dipengaruhi positif secara signifikan oleh investasi dan tingkat pendidikan, sedangkan tenaga kerja hanya berpengaruh positif. Semakin tinggi jumlah investasi, tenaga kerja dan tingkat pendidikan yang terjadi di tingkat kabupaten dan kota maka akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.

Muhammad Rizal (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “*Pengaruh Investasi Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Indonesia tahun 2007-2010*” dengan variabel yang digunakan adalah variabel dependen (Y) : Pertumbuhan Ekonomi dan variabel independen X1 : Investasi Pemerintah, X2 : Tenaga Kerja, X3 : Desentralisasi Fiskal. Metode analisis yang digunakan adalah *Ordinary Least Square* (OLS) dengan *Fixed Effect Model* dan *White Cross*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi pemerintah, jumlah tenaga kerja, dan desentralisasi fiskal kabupaten di Indonesia pada periode 2007-2010 memiliki pengaruh positif

dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi pada taraf alfa = 1%. Untuk setiap kenaikan 1% ratio belanja modal terhadap PDRB berlaku akan memberikan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,035%. Untuk setiap kenaikan 1000 orang tenaga kerja di kabupaten di Indonesia akan memberikan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,004%. Desentralisasi fiskal yang diproksi dengan tingkat kemandirian daerah berupa rasio antar Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah juga akan memberikan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,069 % untuk kenaikan setiap 1% tingkat kemandirian daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan data sekunder rentang waktu antara tahun 2012-2016. Data merupakan segala keterangan atau informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data sekunder digunakan karena penelitian yang dilakukan meliputi objek yang bersifat makro dan mudah didapat. Data tersebut diolah kembali sesuai dengan kebutuhan model yang digunakan. Sumber data berasal dari berbagai sumber, antara lain Badan Pusat Statistik, BKPM dan Laporan Tahunan KPK. Selain itu, penulis juga melakukan studi literatur untuk mendapatkan teori yang mendukung penelitian. Referensi studi kepustakaan diperoleh melalui jurnal ilmiah dan perpustakaan FE Universitas Islam Indonesia. Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode *fixed effect model*.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi yang dinyatakan dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 selama periode 2012-2016 yang di dapat melalui sumber terpercaya yaitu Badan Pusat Statistika (BPS) dengan satuan dalam miliar rupiah.

Investasi adalah jumlah total PMA dan PMDN berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal menurut lokasi 2016 yang di dapat melalui sumber terpercaya yaitu BKPM dengan menggunakan satuan rupiah.

Tenaga kerja adalah jumlah usia produktif angkatan kerja yang bekerja mulai dari usia 16-18 tahun di 33 Provinsi di Indonesia tahun 2012-2016 per Agustus yang di dapat melalui sumber terpercaya yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) yang diukur dalam satuan jiwa.

Tingkat Pendidikan adalah tingkat angka partisipasi sekolah yang berumur dari 19-24 tahun yang berarti penduduk yang berpendidikan tamatan SMA keatas (tamatan SMA dan Perguruan Tinggi). Data APS ini diperoleh dari sumber terpercaya yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dengan satuan persen.

Korupsi adalah laporan gratifikasi tahunan yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun 2012-2016 pada masing-masing provinsi di Indonesia. Data ini di dapat dari sumber terpercaya yaitu laporan tahunan KPK dengan menggunakan satuan jumlah kasus yang ditangani KPK.

Hasil Analisis

Penaksiran Model Regresi

Langkah awal dalam pengujian regresi data panel yaitu melalui pengujian penaksiran model penelitian. Pengujian ini digunakan untuk melihat model penaksiran regresi data panel yang tepat untuk melakukan estimasi. Pengujian penaksiran model penelitian terdiri dari:

1. *Common Effect Model dan Fixed Effect Model (chow test)*

Untuk mengetahui model data panel yang akan digunakan, maka digunakan uji F-Restricted dengan membandingkan F-statistik dan F-tabel terlebih dahulu dibuat hipotesisnya. Adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut :

H0 : Model PLS (*Restricted*)

H1 : Model FEM (*Unrestricted*)

Dari hasil regresi berdasarkan metode *fixed effect* dan *Pooled Least Square* menggunakan uji chou diperoleh nilai F-statistik adalah 590,481510 dengan nilai pvalue sebesar 0,000, sehingga pvalue $< 0,05$, maka H_0 ditolak sehingga model data yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

2. *Fixed effect Model dan Random Effect Model (hausman test)*

Setelah diketahui bahwa model yang digunakan adalah *fixed effect model*, model data panel masih harus dibandingkan lagi antara *fixed effect model* dengan *random effect*. Dari hasil regresi diperoleh hasil pengujian Housman untuk *Random Effect* dengan *Fixed Effect* diperoleh probabilitas *cross section random* sebesar $0,000 < 0$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang dapat digunakan adalah *fixed Effect Model*.

Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Untuk mengetahui pengaruh investasi (X1), tenaga kerja (X2), tingkat pendidikan (X3) dan korupsi (X4) terhadap PDRB (Y) menggunakan model regresi data panel *random effect*, uji asumsi klasik tidak dilakukan untuk model regresi *random effect*. Menurut Gujarati & Porter (2009), persamaan yang memenuhi asumsi klasik hanya persamaan yang menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS). Dalam evIEWS model estimasi yang menggunakan metode GLS hanya *random effect model*, sedangkan *fixed effect* dan *common effect* menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS). Apabila berdasarkan pemilihan metode estimasi yang sesuai untuk persamaan regresi adalah *random effect*, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Sebaliknya, apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan *common effect* atau *fixed effect* (OLS) maka perlu dilakukan uji asumsi klasik. Tambahan jika metode yang terpilih *common effect* atau *fixed effect* (OLS) dan tidak lolos uji asumsi klasik maka bisa diobati dalam EVIEWS sehingga menjadi lolos uji asumsi klasik dan hasilnya memenuhi BLUE.

Pembahasan

Setelah dilakukan uji asumsi klasik (uji ekonometrika) dan uji secara statistik, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis secara ekonomi terhadap koefisien regresi dari variabel-variabel dalam analisis regresi data panel.

1. Pengaruh Investasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Hasil penelitian membuktikan bahwa dalam investasi berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB provinsi di Indonesia. Nilai koefisien regresi untuk variabel investasi (X1) sebesar $2,77E10-09$. Hal ini berarti setiap kenaikan satu rupiah investasi, maka PDRB akan bertambah sebesar $2.77E-09\%$. Hasil ini sesuai penelitian Muhammad Rizal (2013) yang membuktikan bahwa investasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Hasil penelitian membuktikan bahwa dalam tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB provinsi di Indonesia. Nilai koefisien regresi untuk variable tenaga kerja (X2) sebesar -0.023756 . Hal ini berarti setiap kenaikan satu jiwa tenaga kerja, maka akan menurunkan PDRB sebesar -0.023756% .

Hasil ini disebabkan karena mayoritas tenaga kerja di Indonesia yaitu jumlah angkatan kerja lulusan diploma/universitas relatif sedikit dibandingkan dengan lulusan SMA ke bawah. Selain itu penyerapan tenaga kerja yang rendah menyebabkan potensi tenaga kerja di Indonesia belum terserap secara maksimal. Jumlah tenaga kerja tanpa didukung dengan produktifitas yang tinggi akan berakibat tidak berpengaruh terhadap PDRB.

3. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Hasil penelitian membuktikan bahwa dalam tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB provinsi di Indonesia. Nilai koefisien regresi untuk variabel tingkat pendidikan (X3) sebesar 3039.031. Hal ini berarti setiap kenaikan satu persen tingkat pendidikan, maka PDRB akan bertambah sebesar 3039.031%.

4. Pengaruh Korupsi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Hasil penelitian membuktikan bahwa dalam korupsi berpengaruh negatif signifikan terhadap PDRB provinsi di Indonesia. Nilai koefisien regresi untuk variabel korupsi (X4) sebesar -1191.405. Hal ini berarti setiap kenaikan satu kasus korupsi, maka akan menurunkan PDRB sebesar -1191.405%. Hasil ini sesuai penelitian Dewi (2002) yang membuktikan bahwa korupsi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penutup

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode *fixed effect*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Provinsi di Indonesia, yang berarti setiap kenaikan satu rupiah investasi, maka PDRB akan bertambah sebesar 2.77E-09%. Dengan meningkatnya jumlah investasi maka PDRB Provinsi di Indonesia juga akan meningkat.
2. Tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB Provinsi di Indonesia. Hal ini berarti peningkatan tenaga kerja tidak akan mempengaruhi perubahan PDRB Provinsi di Indonesia.
3. Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB provinsi di Indonesia. Hal ini berarti setiap peningkatan

satu tingkat pendidikan akan mempengaruhi PDRB Provinsi di Indonesia.

4. Korupsi berpengaruh negatif signifikan terhadap PDRB Provinsi di Indonesia. Hal ini berarti setiap kenaikan satu kasus korupsi, maka akan menurunkan PDRB sebesar -1191.405%.
5. Investasi, Tingkat Pendidikan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Provinsi di Indonesia.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen sehingga belum mencakup semua faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB.

Implikasi

Ada beberapa implikasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Upaya-upaya yang diperlukan untuk mendorong peningkatan investasi perlu untuk direalisasikan dan dikembangkan sehingga stok modal dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut misalnya terdapat kemudahan dalam akses permodalan dan adanya insentif untuk para investor.
2. Tenaga kerja di masing-masing provinsi di Indonesia harus lebih ditingkatkan lagi kualitasnya, yaitu dengan cara mengembangkan sistem keterpaduan antara kepelatihan keterampilan, dunia pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Pemerintah harus melatih dan menyiapkan mental yang matang terhadap tenaga kerja dengan cara memberi pelatihan-pelatihan sehingga bisa menghasilkan tenaga kerja yang produktif untuk mengembangkan tenaga kerja, dengan terserapnya tenaga kerja maka akan membantu dalam meningkatkan proses produksi dan juga akan meningkatkan PDRB.

3. Tingkat pendidikan, pemerintah sebaiknya dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bersekolah dengan adanya beasiswa untuk anak-anak yang bersekolah. Selain itu, pemerintah juga tetap mempertahankan fasilitas-fasilitas yang terdapat di sekolah agar minat dan semangat anak di Provinsi Indonesia untuk bersekolah terus meningkat dan dapat bersaing dengan sekolah lain dengan tahap internasional, serta perlunya menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sebagai human capital *investment* sehingga kualitas sumber daya manusia semakin baik.
4. Harus ada kebijakan yang tegas sesuai dengan undang-undang mengenai hukuman bagi para koruptor pada suatu negara agar tingkat korupsi atau tingkat kasus-kasus korupsi dapat ditekan di Indonesia dan agar tingkat PDRB dan pendapatan perkapita pada masyarakatnya juga mengalami kenaikan. Karena semakin bersih dari korupsi, maka negara tersebut dapat meningkatkan nilai PDRB nya.

Daftar Pustaka

- Arsyad, lincoln. (2004), *Ekonomi Pembangunan* Edisi Ke 4, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Dewi, S.N. P (2002). *Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Investasi Domestik dan Foreign Direct Investment (11 Negara Asia Tahun 1995 – 2000)*. Tesis Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Gujarati, Damodar N., dan Dawn C.P. 2009. *Basic Econometrics*. Singapura: The McGraw-Hill Companies Inc.
- Maulana (2013), *Analisis Pengaruh Investasi Tenaga Kerja, dan Tingkat Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat (Studi Empiris Jawa Barat)*.
- Muhammad Rizal (2013), *Pengaruh Investasi Pemerintah, Tenaga Kerja, dan Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Indonesia tahun 2007-2010*, Universitas Padjajaran.
- Sadono, Sukirno. (2012), *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryono (2010), *Analisis Pengaruh PAD, Tingkat Investasi, dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Jawa Tengah (Studi Empiris di Jawa Tengah)*.

Todaro, Michael P., dan Smith, Stephen C. (2006), *Pembangunan Ekonomi / Edisi Kesembilan, Jilid 1* (Alih Bahasa: Haris Munandar dan Puji A.L.). Jakarta: Penerbit Erlangga.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang – undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.